

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam pemerintahan saat ini mendorong terbentuknya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas pemerintah. Untuk mencapai *good governance*, diperlukan transformasi mendasar dalam cara pandang terhadap pemerintahan. Transformasi ini menuntut adanya sistem yang mampu memberdayakan pemerintah daerah agar lebih mandiri dan kompetitif, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, tanpa terus bergantung pada pemerintah pusat.

Setiap kabupaten memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola wilayahnya secara mandiri. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Agam, di mana penetapan Peraturan Daerah merupakan bagian dari kewajiban konstitusional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah secara maksimal, seiring dengan perkembangan dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam rangka menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya reformasi di bidang akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena proses akuntansi berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Perubahan dalam sistem akuntansi pemerintahan harus berlandaskan pada kerangka yang kokoh, yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Standar ini

juga dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman baku bagi seluruh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk unit-unit organisasi di dalamnya, untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peraturan ini wajib diterapkan oleh seluruh daerah otonom, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan pemahaman.

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi hal yang krusial untuk dilakukan secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode anggaran, sehingga dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan juga menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang berasal dari publik. Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja keuangan adalah pada komponen belanja daerah. Hal ini tidak hanya mencerminkan seberapa besar dana publik dibelanjakan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana dana tersebut digunakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisiensi merujuk pada sejauh mana dana yang tersedia mampu menghasilkan output maksimal, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan untuk kepentingan publik, sedangkan prinsip ekonomis menekankan pada pemanfaatan sumber daya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai, namun dengan biaya yang paling rendah (Mardiasmo, 2013).

Pengawasan terhadap pelaksanaan belanja daerah merupakan aspek yang sangat krusial dalam manajemen keuangan publik. Setelah proses belanja dilaksanakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), diperlukan analisis lanjutan terhadap realisasi tersebut sebagai dasar evaluasi, koreksi, serta perbaikan kebijakan

di masa mendatang. LRA yang diterbitkan oleh pemerintah daerah menyediakan informasi yang bernilai dalam menilai kinerja keuangan daerah. Dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas, LRA memiliki urgensi yang lebih tinggi karena umumnya disusun terlebih dahulu dan menjadi dasar bagi penyusunan laporan-laporan lainnya.

Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Fungsi anggaran mencakup peran sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, distribusi dan alokasi sumber daya publik, alat perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi, serta sebagai sarana penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA dipandang sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling esensial dalam sistem keuangan daerah. Melalui LRA, pengguna laporan dapat melakukan berbagai analisis kinerja keuangan, seperti analisis terhadap pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu bentuk utama laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah memiliki peran yang sangat vital sebagai dasar dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dalam kerangka keuangan publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam mendistribusikan dan mengalokasikan sumber daya publik secara optimal. Selain itu, anggaran menjadi alat penting dalam proses perencanaan, pengendalian organisasi, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Agam berkaitan dengan proses pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merujuk pada pembagian dana yang ditetapkan untuk mendanai masing-masing program dan kegiatan secara proporsional. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan pendapatan yang tersedia secara efisien, khususnya untuk belanja-belanja daerah yang bersifat produktif.

Belanja daerah sendiri merupakan estimasi beban pengeluaran yang dirancang untuk dialokasikan secara adil dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik.

Salah satu fungsi strategis pemerintah daerah adalah menyediakan dan mengembangkan infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengalokasian belanja publik sebaiknya difokuskan pada kegiatan-kegiatan produktif, terutama yang berkaitan dengan pembangunan.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, pengukuran kinerja keuangan menjadi aspek yang sangat krusial untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Salah satu fokus utama pengukuran kinerja tersebut adalah belanja daerah. Evaluasi terhadap belanja daerah tidak hanya menekankan pada sejauh mana anggaran dibelanjakan, melainkan juga mencakup sejauh mana belanja tersebut dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan dana publik untuk menghasilkan output maksimal. Efektivitas mengacu pada sejauh mana penggunaan anggaran mampu mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat. Sementara itu, prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan serta pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada harga terendah yang tersedia (Mardiasmo, 2013).

Belanja daerah mencerminkan implementasi kebijakan fiskal pemerintah dan pada dasarnya, menghasilkan pendapatan publik cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan proses membelanjakannya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik belanja yang relatif lebih mudah dilaksanakan, namun juga memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya inefisiensi maupun kebocoran anggaran. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, pengendalian yang ketat, serta pengawasan yang menyeluruh terhadap

pelaksanaan belanja menjadi sangat penting. Setelah proses belanja dilakukan dan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perlu dilakukan analisis mendalam sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, perbaikan kebijakan, serta penyusunan strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik pada periode selanjutnya (Mahmudi, 2015).

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian kinerja keuangan pada entitas bisnis. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal (profit atau laba bersih), sistem keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran dan tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Meskipun dalam laporan keuangan terdapat istilah surplus atau defisit sebagai selisih antara pendapatan dan belanja, baik dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), istilah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal dalam menilai kualitas kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Surplus atau defisit anggaran lebih merefleksikan kondisi fiskal pada periode tertentu, namun bukan menjadi penentu utama terhadap baik buruknya pengelolaan keuangan daerah. Menurut Rochmah (2015), kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor kunci, antara lain besarnya penerimaan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, pengelolaan pembiayaan, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi makroekonomi daerah yang bersangkutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan atau penurunan dilihat dari tingkat analisis varian (selisih) anggaran, rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio efisiensi.

### **1.3 Tujuan**

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a) Mengetahui bagaimana kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Agam.

### **1.4 Manfaat Magang**

Berikut adalah manfaat yang diharapkan, yaitu:

#### **A. Bagi Penulis**

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan.
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam dunia kerja agar dapat menjadi bekal bagi penulis untuk selanjutnya.
3. Mendapatkan data yang relevan untuk menujung penulis menyelesaikan tugas akhir.

#### **B. Bagi Perusahaan**

1. Membantu kegiatan-kegiatan tempat magang(kantor/perusahaan) selama masa magang berlangsung.
2. Membangun hubungan baik antara pihak perusahaan dengan pihak kampus.

#### **C. Bagi Universitas**

1. Sebagai bahan acuan dan perbandingan untuk mengukur standar kurikulum pendidikan yang diimplementasikan pada perusahaan.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional sesuai bidangnya.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Agam dengan waktu pelaksanaan selama 40 hari kerja, yaitu dimulai Januari dan berakhir Maret 2024.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang rumusan masalah, manfaat magang, sistematika penulisan laporan magang.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Menjelaskan definisi Keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Klasifikasi Belanja Daerah, dan Laporan Realisasi Anggaran.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan profil umum dari Sekretariat DPRD Kabupaten Agam mencakup sejarah singkat, visi misi, tujuan serta struktur organisasi

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Yaitu pembahasan terkait perhitungan dan analisis anggaran belanja daerah pada laporan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Agam.

### **BAB V: PENUTUP**

Memuat kesimpulan beserta saran hasil penelitian yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.